



— **NEGARA DAN PENDIDIKAN** —

Dalam Perspektif Pedagogi Kritis



**SRI WAHYUNI
NINDITA FAJRIA UTAMI
PUSPITA WULANDARI**

NEGARA DAN PENDIDIKAN

Dalam Perspektif Pedagogi Kritis

Perubahan kurikulum bukan hanya persoalan pendidikan semata, tetapi juga menunjukkan adanya unsur kekuasaan dalam pendidikan. Hal ini senada dengan pendidikan dalam perspektif pedagogi kritis yang selalu menekankan bahwa hubungan pedagogis melibatkan hubungan kekuasaan dan dominasi. Tidak ada pengetahuan yang bersifat netral yang dapat membentuk kesadaran manusia. Di dalam proses “mengetahui”, selalu saja terdapat pengaruh dari adanya relasi antara kuasa dan pengetahuan. Michael W. Apple, mengatakan bahwa kurikulum pendidikan yang berlaku sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan dalam rangka mengekalkan struktur kekuasaannya. Paulo Freire juga mengakui bahwa sekolah memang merupakan alat kontrol sosial yang efisien bagi upaya menjaga status quo. Dengan meminjam konsep pendidikan kritis tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kecenderungan tema-tema ideologi atau isu-isu global dalam teks KBK, KTSP dan Kurikulum 2013, utamanya dalam pembelajaran sosiologi. Pendekatan *critical discourse analysis* dari Norman Fairclough digunakan untuk menjelaskan proses produksi, distribusi dan konsumsi teks, serta menggambarkan pengaruh kondisi sosial, budaya dan politik pada saat teks-teks tersebut dihasilkan.



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-959-7



9 786231 519597

NEGARA DAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEDAGOGI KRITIS

Sri Wahyuni
Nindita Fajria Utami
Puspita Wulandari



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**NEGARA DAN PENDIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF PEDAGOGI KRITIS**

Penulis : Sri Wahyuni
Nindita Fajria Utami
Puspita Wulandari

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Meilita Anggie Nurlatifah

ISBN : 978-623-151-959-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,**
DESEMBER 2023
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kekuatan yang dilimpahkan-Nya, buku dengan judul **“NEGARA DAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEDAGOGI KRITIS”** ini dapat kami selesaikan penyusunannya.

Secara garis besar, buku ini menjelaskan tentang: Kekuasaan dan Pendidikan; Kurikulum dan Kekuasaan Transmitif; Pendidikan dalam Perspektif Kritisi; *Critical Discourse Analysis (CDA)* Norman Fairclough dalam teks kurikulum; Praktik Kuasa Negara dalam Pembelajaran Sosiologi dan lain sebagainya.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa di dalam buku ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan ke depan, kami sangat mengharapkan adanya sumbang saran pemikiran dari semua pihak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENGANTAR.....	1
BAB 2 KEKUASAAN DAN PENDIDIKAN.....	12
A. Kekuasaan dalam Pendidikan.....	12
B. Ideologi dan Pendidikan.....	15
C. Ideologi dan Kurikulum.....	16
BAB 3 KURIKULUM DAN KEKUASAAN TRANSMITIF	18
A. Kurikulum Pendidikan: Definisi Ahli.....	18
B. Komponen Kurikulum Pendidikan.....	19
C. Kurikulum Pendidikan dalam Rentang Sejarah Reformasi.....	21
BAB 4 PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF KRITIS	38
A. Mengenal Perspektif Pedagogis Kritis dalam Pendidikan.....	38
B. Gagasan Paulo Freire tentang Pendidikan Pembebasan.....	42
C. Henry Giroux: Sekolah, kapitalisme dan budaya positivisme.....	48
D. Michael W. Apple: Dominasi Ekonomi, Politik dan Nilai-Nilai Budaya.....	49
BAB 5 CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (CDA) NORMAN FAIRCLOUGH DALAM TEKS KURIKULUM'	52
A. Wacan Dan Reproduksi Ideologis.....	52
B. Wacana dan Penelitian.....	54
BAB 6 ANALISIS PRAKTIK WACANA TEKS KURIKULUM PASCA REFORMASI.....	59
A. Proses Produksi Teks Kurikulum.....	59
B. Sistem Distribusi Teks Kurikulum.....	64
C. Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dan Peranan Guru dalam Implementasi Kurikulum: Kontrol Atas Konsumsi Teks Kurikulum.....	69

BAB 7	ANALISIS PRAKTIK SOSIO-KULTURAL TEKS KURIKULUM PASCA REFORMASI	75
	A. Reformasi (1998): Tuntutan Perubahan Sistem Sosial Politik Nasional	75
	B. Arah Kebijakan Politik Pendidikan: Sentralisasi → Desentralisasi.....	77
	C. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003: Dilema Reformasi Pendidikan Nasional	80
	D. Wajah Pendidikan Indonesia Pasca Reformasi: Dekadensi Moral Generasi Penerus Bangsa	83
BAB 8	PRAKTIK KUASA NEGARA DALAM PEMBELAJARAN SOSIOLOGI PASCA REFORMASI.....	87
	A. Representasi Negara dalam Pendidikan: Kajian Kritis pada KBK, KTSP, dan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Sosiologi di Sekolah Menengah Atas Pasca Reformasi	87
	B. Wacana Kuasa Negara dalam Kurikulum Sosiologi SMA Pasca Reformasi	93
BAB 9	KURIKULUM SOSIOLOGI PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KRITIS.....	97
	A. Tema-tema Ideologi Negara dalam Kurikulum Sosiologi SMA	97
	B. Henry Giroux dan Michael W. Apple: Standarisasi Kurikulum (Bentuk Pendisiplinan dan Penjinakan dalam Ruang-Ruang Kelas).....	100
	C. Konsep Michael W. Apple dan Relevansinya dalam Kurikulum Pendidikan Pascareformasi	106
	D. Paulo Freire: Wacana Pendidikan Pembebasan, Relevansi dan Respon Praktisi Pendidikan pada Kurikulum Sosiologi SMA Pascareformasi.....	108
	DAFTAR PUSTAKA	125
	TENTANG PENULIS	130



**NEGARA DAN PENDIDIKAN
DALAM PERSPEKTIF
PEDAGOGI KRITIS**

Sri Wahyuni
Nindita Fajria Utami
Puspita Wulandari



BAB 1

PENGANTAR

Pendidikan ialah salah satu cita-cita nasional bangsa Indonesia yang termaktub pada Pembukaan UUD tahun 1945 alinea keempat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan ini, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU. Menurut pasal ini, praktik pendidikan nasional dijalankan sesuai dengan landasan yuridis yang sudah ditentukan, yang dapat berupa peraturan pemerintah atau UU.

Yang dimaksud dengan UU tersebut ialah UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi penyempurnaan dari UU RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa tersebut perlu strategi pembangunan pendidikan nasional berupa kurikulum. Kurikulum menempati kedudukan yang strategis atas segala aspek upaya pendidikan sebagai suatu rancangan pendidikan. Kurikulum Indonesia telah mengalami evolusi terus menerus sejak kemerdekaan negara ini. Dalam sejarah penggunaan kurikulum yang pernah dipergunakan yakni kurikulum pasca kemerdekaan 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, serta KBK yang disempurnakan menjadi KTSP, serta yang baru saja dipraktikkan di tahun Pelajaran 2013/2014 yaitu Kurikulum 2013.

Pada masa orde lama, kurikulum yang berlaku ialah kurikulum 1947 (leer plan atau rentjana pelajaran), 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai) serta 1964 (Rentjana Pendidikan). Tujuan

BAB

2

KEKUASAAN DAN PENDIDIKAN

A. Kekuasaan dalam Pendidikan

Dinamika kekuasaan merupakan topik yang sangat menarik, khususnya dalam masyarakat kontemporer. Ada yang mungkin berargumentasi bahwa kekuasaan berdampak pada setiap aspek upaya manusia, termasuk pendidikan. Kekuasaan seringkali menyusup ke dalam kegiatan pendidikan melalui berbagai cara. Pengaruh ini dapat terwujud secara terang-terangan atau obyektif, atau dapat terjadi secara terselubung atau tidak disadari, sehingga memandu upaya akademis yang disebut sebagai *hidden curriculum*.

Terdapat korelasi yang kuat antara pendidikan dan otoritas. Kekuasaan menjadi penyebab munculnya pendidikan. Satu-satunya kekhawatiran adalah apakah wewenang ini selaras dengan arah proses pendidikan yang diharapkan. Proses pendidikan berfungsi sebagai mekanisme yang membebaskan, karena memberikan siswa pemahaman tentang kapasitas otonomi mereka dan memberdayakan mereka untuk berkembang menjadi individu yang unik. Sebaliknya, praktik menjalankan kekuasaan mengacu pada tindakan melakukan kontrol. Hal ini mengandung arti bahwa kekuasaan dipegang oleh mereka yang mempunyai otoritas (*penguasa*), sementara yang lain tunduk pada kontrol atau menjadi objek *penguasa*. Hubungan subordinat antara yang berdaulat dan yang diperintah terbentuk pada saat ini. Kebebasan individu bisa hilang atau terikat pada sumber otoritas atau kekuasaan di luar individu.

BAB 3

KURIKULUM DAN KEKUASAAN TRANSMITIF

A. Kurikulum Pendidikan: Definisi Ahli

Hilda Taba², Kurikulum diartikan menjadi rencana atau program belajar. Taba mengemukakan: *“A curriculum is a plan for learning: therefore, what is know abaout the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of a curriculum (Wina Sanjaya, 2006:5)”*. Pengertian kurikulum adalah “sesuatu yang direncanakan”, dan gagasan atau cita-cita tentang apa artinya menjadi seseorang atau warga negara sering kali dipersiapkan. Menurut Hilda Taba, tujuan dari hampir setiap kurikulum adalah memberikan siswa informasi dan kemampuan yang mereka butuhkan untuk memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat.

Sebaliknya, Pierre Bourdieu memberikan definisi kurikulum sebagai struktur dan substansi sistem pendidikan, yang bertujuan untuk memfasilitasi transfer pengetahuan antargenerasi dalam suatu masyarakat tertentu. UU No. 20 Tahun 2003 yang mendefinisikan kurikulum sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”, adalah pengertian kurikulum yang dipergunakan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini

² Hilda Taba adalah seorang tokoh dalam pengembangan kurikulum, yang ciri khasnya adalah memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum.

BAB

4

PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF KRITIS

A. Mengenal Perspektif Pedagogis Kritis dalam Pendidikan

Padagogi kritis dengan tokoh meliputi Paulo Freire, Michael W. Apple, Henry A. Giroux serta Peter McLaren berpendapat bahwasanya persoalan pendidikan adalah persoalan politik melalui pemikiran kritis. Karena pendidikan tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat bersifat netral, terlepas dari masyarakat, atau objektif, maka inilah yang terjadi. Pendidikan kritis dipahami sebagai paradigma pendidikan yang menggabungkan teori dan praktik, dengan tujuan utama membekali individu-individu yang terpinggirkan dengan kesadaran yang diperlukan untuk terlibat dalam praksis emansipatoris. Pendidikan kritis mewujudkan pandangan politik yang, dengan mengkaji ideologi dan hegemoni, dapat dikaitkan dengan aspek-aspek spesifik yang menjadi perhatian dalam setiap sistem pendidikan.

Pendidikan adalah institusi yang berkomitmen untuk memberdayakan kelompok yang tertindas dan ter subordinasi, bukan bersikap netral, menurut pendidikan kritis. Untuk membangkitkan kesadaran di antara mereka yang tertindas dan melakukan perubahan, pendidikan kritis mengkaji substansi kurikulum, metodologi yang digunakan, dan pendirian lembaga pendidikan. Dalam pengertian ini, pendidikan kritis mengacu pada pendidikan transformasional, yang berupaya menggantikan proses pendidikan yang mempertahankan status

BAB 5

CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (CDA) NORMAN FAIRCLOUGH DALAM TEKS KURIKULUM

A. Wacana Dan Reproduksi Ideologis

Karena wacana secara bersamaan dibentuk oleh struktur dan praktik sosial lainnya serta mereproduksi dan memodifikasi identitas, hubungan sosial (termasuk hubungan kekuasaan), dan pengetahuan, maka wacana merupakan bentuk praktik sosial yang signifikan, menurut Norman Fairclough. Konsekuensinya, wacana dan dimensi sosial lainnya saling bergantung secara dialektis. Fairclough mendefinisikan struktur sosial sebagai kumpulan komponen diskursif dan non-diskursif yang mendefinisikan hubungan sosial pada institusi tertentu dan masyarakat secara luas (Jorgensen & Philips. 2007:122-123).

Wacana, menurut Fairclough, bisa bersifat ideologis pada tingkat yang berbeda-beda. Wacana ideologis yang membantu pelestarian dan modifikasi struktur kekuasaan yang sudah mapan. Definisi sebenarnya dari kekuasaan adalah ideologi (Fairclough, 1995:71). Ideologi, menurut pemahamannya, adalah proses di mana signifikansi dikonstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi pembentukan, pembubaran, dan evolusi dinamika kekuasaan yang didasarkan pada struktur sosial.

Analisis wacana kritis menyelidiki fungsi praktik diskursif yang memajukan kepentingan kelompok sosial tertentu dan cara praktik tersebut membangun hubungan kekuasaan. Analisis wacana kritis menunjukkan suatu pemeriksaan yang berupaya mengungkap fungsi praktik

BAB 6

ANALISIS PRAKTIK WACANA TEKS KURIKULUM PASCA REFORMASI

Pada level analisis praktik wacana, pembahasan dibagi menjadi tiga bagian, yakni pada proses produksi, proses distribusi dan proses konsumsi wacana. Pada ketiganya akan dikaji mulai dari aspek makro sampai aspek mikro, yaitu dengan melihat mulai dari kebijakan atau aturan yang mengatur proses produksi, proses distribusi dan proses konsumsi wacana, sampai praktik wacana itu sendiri.

A. Proses Produksi Teks Kurikulum

Dalam teks kurikulum, pengambil keputusan adalah mereka (individu atau organisasi) yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal tertentu yang terkait kurikulum yang akan dikembangkan dan diajarkan di sekolah tertentu karena kedudukan atau kedudukan profesionalnya (Marsh & Stafford, 1988:161-162). Dengan mengacu pada UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses produksi atau proses dalam pembuatan kurikulum pendidikan dilakukan tim yang dibentuk Pusat Kurikulum dan Sarana Pendidikan atau yang sekarang berganti nama menjadi Pusat Kurikulum dan perbukuan menyiapkan draft Struktur Kurikulum bersama para pejabat di lingkungan Puskurbuk serta staf senior.

Pada rapat pimpinan Balitbang dipimpin Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, struktur kurikulum awal dibahas

BAB 7

ANALISIS PRAKTIK SOSIO-KULTURAL TEKS KURIKULUM PASCA REFORMASI

Pada praktik sosio-kultural, menjelaskan kondisi sosial budaya yang menyertai kemunculan teks-teks kurikulum pendidikan, dikarenakan asumsi bahwasanya konteks sosial budaya yang ada diluar teks memberikan pengaruh bagaimana wacana muncul pada teks. Mengacu pada level analisis praktik sosial budaya Fairclough. Level situasional yakni mengarah kepada waktu atau suasana (konteks peristiwa ketika teks dibuat), level institusional yang melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi pada praktik produksi wacana, serta level sosial yang melihat secara menyeluruh bagaimana kondisi sistem sosial, politik, ekonomi serta budaya masyarakat yang terjadi pada masa teks dibentuk. Pembahasan pada praktik sosial-kultural dimulai pada masa pasca reformasi bergulir, dengan asumsi bahwa periode reformasi tahun 1998 merupakan tonggak utama penyebab lahirnya kurikulum-kurikulum baru yang berusaha melepaskan diri dari rezim Orde Baru, terjadi perombakan politik yang tentunya berdampak besar dalam pendidikan di Indonesia

A. Reformasi (1998): Tuntutan Perubahan Sistem Sosial Politik Nasional

Keberagaman menjadi kekuatan pemersatu pada masa orde baru yang diatur dengan politik terpusat yang berpusat pada kekuasaan pemerintahan yang otoriter. Namun demikian, sebagai akibat dari tuntutan reformasi tahun 1998, integrasi nasional, yang dibangun atas dasar politik budaya yang terstandarisasi, dianggap tidak relevan dengan keadaan dan etos demokrasi global, yang juga tumbuh sebagai konsekuensi dari

BAB 8

PRAKTIK KUASA NEGARA DALAM PEMBELAJARAN SOSIOLOGI PASCA REFORMASI

A. Representasi Negara dalam Pendidikan: Kajian Kritis pada KBK, KTSP, dan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Sosiologi di Sekolah Menengah Atas Pasca Reformasi

Pada bab ini, untuk menemukan ideologi yang berkembang pada setiap kurikulum mata pelajaran Sosiologi, maka analisis level teks dari analisis wacana kritis Norman Fairclough dipergunakan sebagai pisau untuk membedah tiap wacana yang ada. Dalam tataran dimensi teks, Fairclough membaginya atas 3 elemen dasar, yakni representasi, relasi, serta identitas.

1. Analisis Teks Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Sosiologi SMA

Untuk menemukan kecenderungan tema ideologi atau isu-isu global yang sering muncul pada kurikulum, peneliti membuat dan menyimpulkan dari Standar Kompetensi serta Kompetensi Dasar mata pelajaran Sosiologi. Kemudian, dari kesimpulan tersebut terlihat, isu-isu apa saja yang sering muncul dalam kurikulum. Kemudian peneliti melakukan analisis secara kuantitatif, untuk menentukan frekuensi terbesar yang sering muncul. Sesuai dengan hasil analisis yang menggambarkan gagasan sentral, dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

BAB 9

KURIKULUM SOSIOLOGI PASCA REFORMASI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KRITIS

A. Tema-tema Ideologi Negara dalam Kurikulum Sosiologi SMA

Pokok bahasan sub bab kali ini, penulis ingin menghubungkan antara praksis pendidikan di Indonesia (pedagogi) dengan teori (pedagogik) kritis dari mazhab pendidikan kritis. Berdasarkan analisis teks, isu sentral yang menjadi ideologi negara yang sering muncul di kurikulum sosiologi tingkat SMA ialah perubahan sosial budaya (KBK); masyarakat multikultural dan lembaga sosial (KTSP); serta masyarakat multikultural (Kurikulum 2013).

Tabel 6. Isu Sentral dalam Teks Kurikulum Sosiologi SMA Pascareformasi

No	Tema Ideologi	KBK			KTSP			K13		
		X	X I	X II	X	X I	X II	X	X I	X II
1	Peranan sosiologi dalam masyarakat	-			-			-	-	-
2	Masyarakat multikultural		-			-		-	-	-
3	Perubahan sosial budaya			-			-			-

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: BNSP
- Darder, Antonia. Et. Al. (ed). 2003. *The Critical Pedagogy Reader*. New York: Routledge.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. Kurikulum 1994: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Isi Kurikulum. Jakarta:depdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Diknas
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sosiologi SMA & MA. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas
- Eriyanto. 2012. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study Of Language*. London and New York: Longman
- Fasli Jalal & Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama Depdiknas, Bappenas dan Adicita Karya Husada
- Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- . 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES
- Giroux, Henry dan David Purpel (ed). 1983. *The Hidden Curriculum and Moral Education*. California: McCutchan Publishing Corporation
- Giroux, Henry A. 1992. *Border Crossing; Cultural Workers and The Politics of Education*. New York: Rotledge

- Jorgensen & Philips. 2007. Analisis Wacana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kementrian Pendidikan Nasional. 2012. Kurikulum 2013. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas.
- . 2013. Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 SMA/MA dan SMK/MAK Bahasa Indonesia. Jakarta: BPSDMP dan PMP, Kemdikbud
- . 2013. Kompetensi Dasar Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas
- Kemendikbudristek. (2022a). Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. 1-37.
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006. 2006. Standar Isi. Jakarta: Depdiknas
- McClaren, Peter. 1995. Critical Pedagogy and Predatory Culture;Oppositional Politics in Postmodern Era. London: Routledge
- Mu'arif. 2008. Liberalisasi Pendidikan: Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- . 2005. Wacana Pendidikan Kritis: Menelanjangi Problematika, Meretas Masa Depan Pendidikan Kita. Yogyakarta: IRCisoD
- Moh. Yamin. 2009. Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara. Yogyakarta: Ar Ruzz
- Mulyasa .E. 2013. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: Remaja Rosdakarya
- . 2005. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rakhmad Hidayat. 2013. Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran. Jakarta: Rajagrafindo Persada

- Sindhunata. 2003. *Membuka Masa Depan Anak-anak Kita, Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI*. Yogyakarta: Kanisius, hlm:218
- Soedijarto, dkk. 2010. *Sejarah Pusat Kurikulum*. Jakarta: Balitbang, Kemdiknas
- Suparno, P. 2001. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Kanisius
- Tim Penyusun. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang, Depdiknas
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta
- , 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Titscher, Stefan, dkk. 2009. *Metode Analisis Teks & Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Weis, Lois et.al. (ed).2006. *Ideology, Curriculum, and The New Sociology of Education (Revisiting the Work of Michael Apple)*. New York: Routledge.
- Wina Sanjaya. 2006. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Kencana
- Makalah, jurnal dan publikasi ilmiah
- Azmi. 2001. *Kurikulum Berbasis Kompetensi 2001: Analisis Fungsional (Khusus Bidang Studi IPS)*. *Jurnal Pendidikan*. 27 (1): 70-90.
- Hamzah Fansuri. 2011. *Melacak Perkembangan Sosiologi Indonesia: Antara Kekuasaan dan Reproduksi Pengetahuan*. Tesis. Yogyakarta: Fisipol UGM, Tidak Dipublikasi

- Putri, A., & Junaidi, J. (2023). Pelaksanaan Pembelajaran Berdiferensiasi Pada Mata Pelajaran Sosiologi di SMA Negeri 2 Padang Panjang. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(2), 199-208.
- Muchson Abdurrahman, 2004. Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 1. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FIS UNY
- Muh. Taufiq. 2010. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kendala yang dihadapi Pengelola Madrasah Aliyah Nahdatul Wathan (NW) Pancor Lombok Timur. Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana UNY, Tidak Dipublikasi
- Rakhmad Hidayat. 2011. Perspektif Sosiologi tentang Kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17, Nomor 2, Maret 2011
- Ridhah Taqwa. 2010. Relasi Kekuasaan dalam Institusi Pendidikan, Studi Kasus di Sekolah 'Aizifah Yogyakarta. Disertasi. Yogyakarta: Fisipol UGM, Tidak Publikasi
- Saefudin, m dan Budisantoso, H.T. 2007. Sikap Guru Sekolah Dasar di Kota Semarang terhadap Perubahan Kurikulum. *Jurnal Lembaran Ilmu Kependidikan*. 36 (2): 111-118
- Siti Juliantari. 2013. Kurikulum 2013, untuk Siapa?. Tersedia pada <http://www.antikorupsi.org/id/content/kurikulum-2013-untuk-siapa>, tanggal akses 06 Januari 2014, 13:45
- Sunarto, Kamanto. 1999. Strategi penyempurnaan kurikulum sosiologi (SMU). *Jurnal pendidikan dan kebudayaan*, Vol.5 No.18 September 1999. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Yusuf, A. 2007. Kesiapan Sekolah dalam Mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). *Jurnal Lembaran Ilmu Pendidikan*. 36 (2): 85-95

Referensi lain:

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Otonom

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Badan Standar
Nasional Pendidikan

TENTANG PENULIS



Sri Wahyuni, S.Pd., M.A Lulusan Sarjana dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011 dan Pascasarjana Sosiologi Universitas Gadjah Mada di tahun 2016. Saat ini menjadi dosen tetap di Program Studi Pendidikan Sosiologi, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mendedikasikan diri pada bidang pendidikan, pernah mengajar di SMA Yayasan Abdi Karya di Lubuklinggau, juga di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Ketertarikan dalam penulisan pada bidang Sosiologi Pendidikan, Sosiologi Budaya, Metode Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat. Buku pertama yang ditulis tahun 2022 berjudul *Perencanaan Dan Pembelajaran Sosiologi (Pendekatan Perencanaan Pembelajaran Di Era Digital)*, menyusul kemudian buku *Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus* terbit tahun 2023.



Nindita Fajria Utami, M.Pd. Lulusan sarjana dari pendidikan sosiologi universitas pendidikan indonesia di tahun 2016 dan pendidikan sosiologi pascasarjana universitas pendidikan indonesia pada tahun 2018. Saat ini menjadi dosen tetap pada program studi pendidikan sosiologi FPIPS UPI. ketertarikan penulis dalam

menjalankan riset terhadap budaya dan pendidikan, yang pernah dilaksanakan yakni mengenai enkulturasi pelaksanaan ngabubur suro di desa Nagarawangi kabupaten sumedang, perubahan sosial pada masyarakat suku sasak sade lombok, di sisi lain pada penulisan pada bidang sosiologi pendidikan, sosiologi pariwisata,

perubahan sosial dan budaya. Buku pertama yang ditulis tahun 2022 berjudul *Perencanaan Dan Pembelajaran Sosiologi (Pendekatan Perencanaan Pembelajaran Di Era Digital)*.



Puspita Wulandari, M.Pd. Penulis lahir di Indramayu, 8 Agustus 1993. Penulis ialah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi,

Universitas Pendidikan Indonesia, jenjang Sarjana di tahun 2015 dan jenjang Magister pada tahun 2017.